



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2017-2022**

**KECAMATAN GONDOKUSUMAN  
KOTA YOGYAKARTA  
2017**

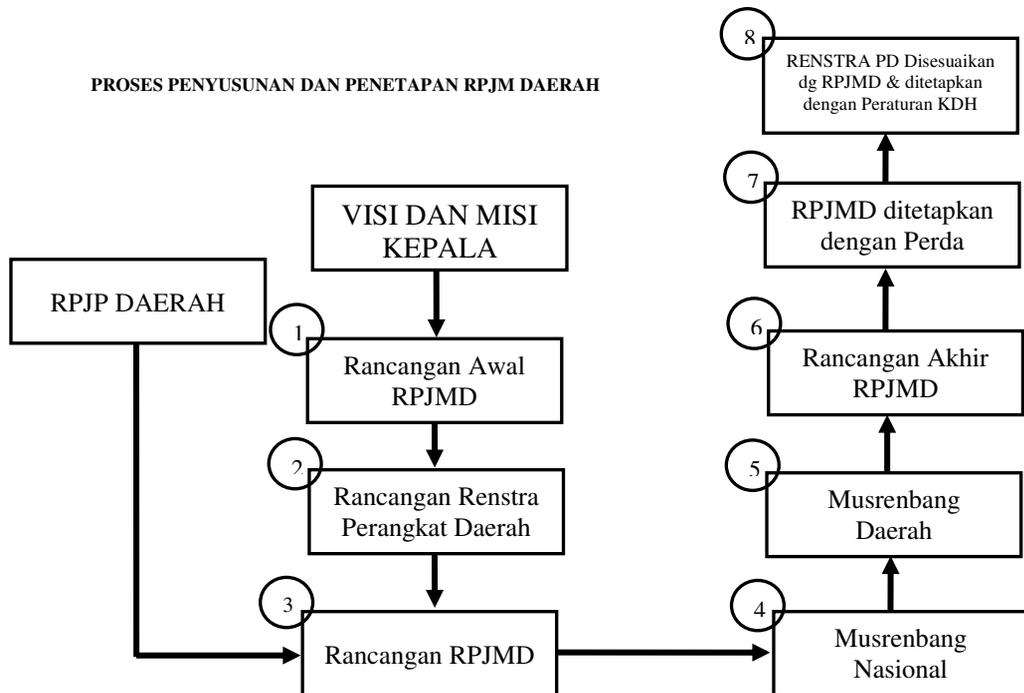
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.



Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.



## 1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gondokusuman yang memuat program dan kegiatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

	3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra DIY
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

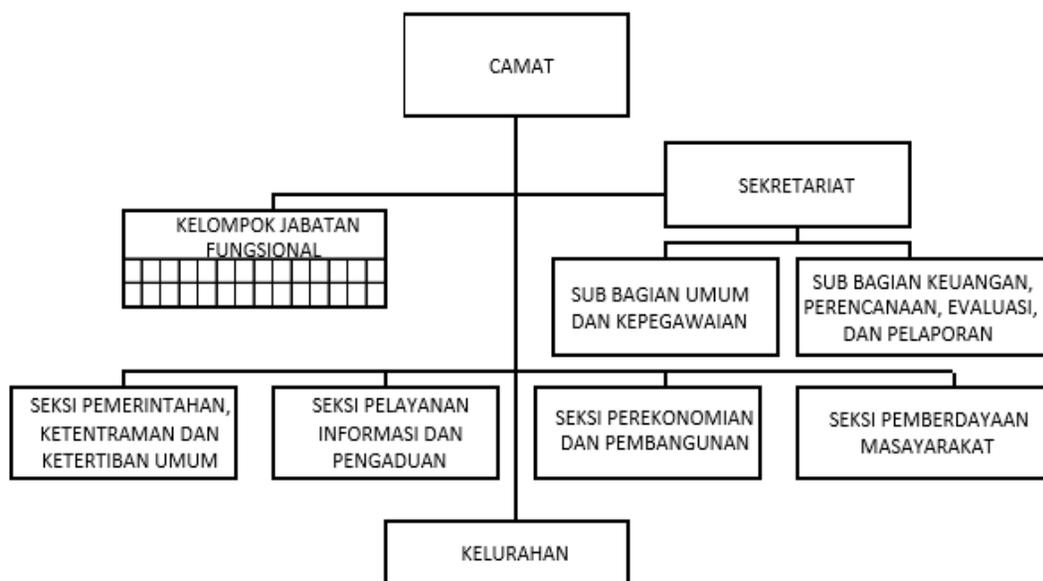
**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Gondokusuman**

Pembentukan kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemerintahan daerah, sehingga cukup panjang apabila seluruhnya diuraikan pada bab ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomer 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, kecamatan berkedudukan :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gondokusuman sebagai Kecamatan Tipe A mempunyai struktur sebagai berikut:

Struktur Kecamatan Tipe A



**2.2. Sumber Daya Kecamatan Gondokusuman**

**2.2.1. Sumber Daya Manusia/kepegawaian**

Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Kecamatan Gondokusuman berjumlah sebagai berikut :

PNS : 45 orang

Naban : 1 orang

Tabel 2.1  
Pegawai Kecamatan Gondokusuman

	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol.I II	Gol .IV	Jumlah
1.	Camat	1	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris kecamatan	1	-	-	-	-	1	1
3.	Kasi kecamatan	3	1	-	-	4	-	4
4.	Kasubag	1	1	-	-	2	-	2
5.	JFU kecamatan	2	4	1	3	2	-	6
6.	JFT kecamatan	1	-	-	1	-	-	1
7.	Naban kecamatan	1	-	-	-	-	-	1
8.	Lurah	4	1	-	-	5	-	5
9.	Sekretaris kelurahan	1	4	-	-	5	-	5
10.	Kasi Kelurahan	8	7	-	-	15	-	15
11.	JFU kelurahan	5	-	-	3	2	-	5
12.	Naban kelurahan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	28	18	1	7	35	2	46

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Gondokusuman 2017;

Tabel 2.2  
Data Pegawai Yang Sudah Mengikuti Diklat Penjurusan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	2	-
2	Diklatpim IV	17	10	7
3	ADUM	12	6	6
4	SEPADA	1	1	-
5	Struktural yang belum diklat	1	-	1

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Gondokusuman 2017;

Tabel 2.3  
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki - laki	Perempuan
1	S2	4	2	2
2	S1	12	9	3
3	D III	8	3	5
4	SLTA	19	12	7
5	SLTP	3	2	1
6.	SD	-	-	-
	Jumlah	46	28	18

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Gondokusuman 2017;

Tabel 2.4  
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Lak-laki	Perempuan
1	III A	1	1	-

2	III B	1	1	-
3	IV A	9	7	2
4	IV B	22	10	12

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Gondokusuman 2017;

## 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Gondokusuman adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Inventaris Aset Kecamatan Gondokusuman

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Ke t
1	2	3	4	5	6	7
1	01		TANAH			
		01	TANAH	0	0,00	
			<b>Jumlah KIB A</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
2	02		PERALATAN DAN MESIN			
		02	ALAT -ALAT BESAR	5	8.900.900,96	
		03	ALAT- ALAT ANGKUTAN	32	418.176.762,29	
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	8.600.000,00	
		05	ALAT PERTANIAN	1	5.300.000,00	
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.387	943.216.661,85	
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	54	98.769.492,87	
		08	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0	0,00	
		09	ALAT LABORATORIM	7	830.000,00	
		10	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	22	17.100.000,00	
			<b>Jumlah KIB B</b>	<b>1.510</b>	<b>1.502.523.542,40</b>	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN			
		11	BANGUNAN GEDUNG	21	4.544.604.115,25	
		12	MONUMEN	64	54.164.971,14	
			<b>Jumlah KIB C</b>	<b>85</b>	<b>4.598.769.086,39</b>	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		13	JALAN DAN JEMBATAN	0	0,00	
		14	BANGUNAN AIR/IRIGASI	0	0,00	
		15	INSTALASI	0	0,00	
		16	JARINGAN	0	0,00	
			<b>Jumlah KIB D</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
5	05		ASET TETAP LAINNYA			
		17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	216	6.657.000	
		18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	6	80.624.181,82	
		19	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN	0	0,00	
			<b>Jumlah KIB E</b>	<b>222</b>	<b>87.281,181,82</b>	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			

			<b>Jumlah KIB F</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Jumlah Total</b>	<b>1.817</b>	<b>6.188.573.810,71</b>

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Gondokusuman Juli 2017;

## 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondokusuman

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondokusuman

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondokusuman

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat		79,71		77,5	78	78,5	79	79,5	81,24	79	79,13	79,57	80,04	100 %	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya swadaya masyarakat				25,37	26	27	28	30	25,37	27	28	28	30	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Gondokusuman 2016;

.2.3.2. Kinerja Keuangan

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	449.691.010	660.089.160	774.978.300	772.629.052	874.430.939	417.689.681	584.680.646	685.059.841	705.779.815	822.942.673	90,83	88,48	88,5	91,35	94,05	14,75 %	13 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.359.800	129.911.303	262.364.600	417.727.800	478.736.000	57.630.792	103.839.840	172.458.846	378.394.294	448.933.170	91,11	79,84	65,6	90,58	93,7	27,3 %	25 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	23.000.000	41.500.000	39.500.000	39.957.500	-	23.000.000	41.500.000	39.140.000	39.957.500	-	100	100	99,09	100	38 %	30 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.860.000	6.560.000	21.384.500	21.384.500	35.030.000	1.860.000	6.474.000	19.915.500	21.170.500	30.591.900	100	98,6	93,1	99	87,3	40 %	35 %
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman	23.000.000	1.405.309.150	1.808.987.550	2.186.810.700	2.410.035.000	22.700.000	1.318.522.450	1,514.689.395	1.999.115.640	2.312.791.483	98,07	93,8	83,7	91,42	95,9	29,25 %	27 %
Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan	37.072.000	-	-	-	-	31.900.500	-	-	-	-	86,01	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman	-	192.590.250	273.141.850	488.682.160	491.741.929	-	164.555.000	248.453.650	453.618.935	460.858.529	-	85,4	90,08	92,82	93,68	45 %	40 %

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gondokusuman**

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Gondokusuman. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **2.4.1. Tantangan**

Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu :

1. Kemajuan tehnologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah serta transparan.
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

### **2.4.2. Peluang**

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan

prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gondokusuman**

Identifikasi permasalahan dari masing-masing program di Kecamatan Gondokusuman dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peraturan tentang pelayanan publik, SOP, SPP	Kondisi kantor kurang memadai	Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi
	Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan	Peraturan tentang pelayanan publik, SOP, SPP	Pemahaman terhadap SOP, SPP belum optimal	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik cukup tinggi
	Media informasi kepada masyarakat terbatas	UU keterbukaan informasi publik	Kemampuan di bidang IT terbatas  Penyajian data/informasi belum optimal	Permintaan informasi publik dari masyarakat
	Tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik	Peraturan tentang pelayanan publik, SOP, SPP	Masih kurangnya fasilitas yang ramah terhadap isu gender	Tuntutan terhadap fasilitas pelayanan yang ramah gender cukup tinggi
Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Gondokusuman	Banyak kegiatan usulan masyarakat yang harus diampu, seringkali di luar kewenangan	Perwal pelimpahan kewenangan	SDM dan anggaran yang terbatas	Pemahaman masy dan OPD lain terhadap perwal pelimpahan belum memadai

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Sarana prasarana wilayah rusak	Perwal pelimpahan kewenangan,	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	Banyaknya pelanggaran perda Perijinan, masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan	Perda perijinan, Perda retribusi perwal pelimpahan kewenangan	Kapasitas SDM dalam Penegakan Perda belum optimal  kurang sosialisasi perda	1. Kesadaran masyarakat dalam perijinan  2. Kebersamaan masyarakat dalam ketertiban umum

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari walikota kepada camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan OPD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari walikota kepada camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan camat
7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat/jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya.

Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Selanjutnya Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni mengandung maksud :

1. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas angka rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga.
3. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
4. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat adalah sebagai berikut :

1. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.
2. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatnya aktifitas sektor pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utamapelaya nan jasa kota secara kompetitif dan sebagai gerbong utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.
4. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan, kota, dan regional.
5. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

Selanjutnya Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat mengandung makna sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih
3. Meningkatnya etos kerja berkemajuan, yaitu: cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman, dan mencerahkan.
4. Meningkatnya peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif
5. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta yang berpijak pada nilai keistimewaan adalah :

1. Berkembangnya pemerintahan, pelayanan, dan aktifitas kemasyarakatan Kota Yogyakarta yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai keistimewaan sesuai amanat Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas pembangunan daerah berbasis keistimewaan.
3. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.
4. Berkembangnya semangat “Jogja Berkemajuan” dalam penyelenggaraan pembangunan kota, berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya ngayogyakarta hadiningrat yang religius, memakmurkan, dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Yogyakarta.

Upaya untuk mewujudkan visi **“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”** dirumuskan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kecamatan Gondokusuman memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan walikota;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan visi, misi dan tugas dan fungsi pelayanan, maka **Kecamatan Gondokusuman mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi pertama. Misi pertama adalah Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.**

Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan kewenangan kepada camat dapat dilihat secara umum pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan kewenangan kepada camat dapat dilihat secara umum pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat .

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.				
No	Misi Walikota	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota	1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan	Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan	Dukungan lembaga kemasyarakatan
2.	Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan kemasyarakatan	2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan	Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan
3.	Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.	Adanya output kegiatan OPD lain yang berada di Kecamatan	Mendekatkan pelayanan masyarakat
4.	Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.	Kualitas SDM yang ada belum optimal	Integritas SDM
5.	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan OPD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.	Tugas pembantuan OPD lain pada kegiatan tingkat kecamatan dan kelurahan	Mendekatkan lokus kegiatan kepada masyarakat
6.	Membangun sarana prasarana publik dan permukiman	6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat	Usulan bersifat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan	Mengakomodir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguna
7.	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih			

		7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat	Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan	n Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik
--	--	---	--	---

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

#### 3.3.a. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga

Renstra Kecamatan Gondokusuman mengacu kepada sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri yang terlihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204

					kab/ kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 prop. 250 Kab/kota	30 prop. 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%

9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) dan meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8)

### 3.3.b. Telaahan Renstra DIY

Telaahan renstra yang diacu oleh kecamatan Gondokusuman adalah renstra Biro Tapem DIY. Adapun tabel untuk Renstra Biro Tapem DIY adalah sebagai berikut

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro  
Tapem DIY

Sasaran Renstra Biro Tapem DIY	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Biro Tapem DIY	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil	Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah</li> <li>- Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran OPD</li> </ul>	Kegiatan forkopimka perlu diptertegas kembali terkait dengan kewenangan penganggarannya	Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam membina pemerintahan umum lintas sektor	Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka

Referensi renstra lembaga lain pada tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJP Kota Yogyakarta terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong

terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan peningkatan manajemen pemerintahan, perbaikan proses perencanaan khususnya menyangkut proses pelibatan masyarakat, peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan berintegritas tinggi.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait, untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan

melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau. Kawasan Kotabaru serta kawasan penyangga sekitarnya yang merupakan wilayah Kecamatan Gondokusuman dengan adanya ciri khas kawasan tersebut maka tata bangunan, tata ruang dan tata hijau diprioritaskan pada usaha pelestarian dan pengembangannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta No.1 Tahun 2015, dukungan tersebut sekaligus menunjang peningkatan sektor pariwisata yang merupakan salah satu lokomotif ekonomi di Kota Yogyakarta.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Kecamatan Gondokusuman mendukung penyelenggaraan penataan ruang dalam penataan pedagang kakilima (PKL) untuk mewujudkan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Tabel 3.5  
 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Pemanfaatan kawasan cagar budaya Kotabaru	Adanya bangunan cagar budaya kawasan Kotabaru	Meneguhkan sebagai kawasan cagar budaya	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan optimalisasi kawasan cagar budaya dan partisipasi masyarakat kawasan cagar budaya.	Memperkuat partisipasi masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan kawasan cagar budaya.
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Wisata budaya pendukung kawasan cagar budaya Kotabaru	Kawasan wisata budaya di Kelurahan wisata Terban, klitren dan baciro serta demangan serta Kotabaru sendiri	Meneguhkan sebagai kawasan budaya	SDM yang memahami pengembangan wisata budaya	Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari OPD yang berwenang terkait dengan struktur tata rang dan pola ruang di wilayah.



Terkait dengan tata ruang wilayah Kecamatan Gondokusuman dalam struktur ruang kota adalah sub pusat pelayanan kota, diarahkan sebagai pendukung kawasan wisata budaya yang pengembangannya lebih fleksibel.

Rencana pola ruang adalah inti pelestarian sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra bangunan peninggalan kolonial dan sejarah perjuangan serta citra pendidikan. Pola pemanfaatan ruang yaitu dominansi permukiman dengan intensitas pengembangan sedang dan memperhatikan karakter lingkungan.

Peran Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan yang dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki adalah pengendalian perijinan bangunan yang harus disesuaikan dengan kebijakan tata ruang termasuk pada bangunan cagar budaya dan bangunan dalam kawasan cagar budaya dan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan cagar budaya beserta kawasan penyangga sekitarnya.

Untuk selanjutnya hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6  
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Kawasan pelestarian cagar budaya	Kawasan pelestarian cagar budaya	Meneguhkan sebagai kawasan budaya	SDM yang memahami pengembangan wisata budaya	Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada
Ruang terbuka hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam kampung	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan Takan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disini lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi

lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

Isu strategis yang dihadapi oleh kecamatan Gondokusuman adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010

Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak Tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Gondokusuman pada tahun 2017 yaitu Kelurahan Demangan, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Klitren, Kelurahan Baciro dan Kelurahan Terban. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan. Pada Tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta diinisiasi oleh Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut

dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Rehabilitasi kantor Kecamatan Gondokusuman yang diresmikan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2014, Rehabilitasi kantor Kelurahan Baciro dan Kantor Kelurahan Terban pada tahun 2017. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, surat kabar dan air mineral dan ruang bermain anak serta perpustakaan pada saat warga membutuhkan pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh seksi pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta lurah di wilayah Kecamatan Gondokusuman yang terdiri dari lima kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah ini meningkatkan sarana prasarana sehingga wilayah kecamatan Gondokusuman semakin nyaman untuk dihuni.

d. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap OPD. Output dari program yang dilakukan oleh kecamatan tetap sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Gondokusuman dimana merupakan salah satu Kecamatan

Inklusi di Kota Yogyakarta, maka dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh walikota kepada camat.

e.. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Gondokusuman akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gondokusuman**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Gondokusuman memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondokusuman”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 360.

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek ( tahunan, semesteran, bulanan ).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Gondokusuman menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat”**. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 360.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondokusuman	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondokusuman	350	352	354	356	358	360



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Gondokusuman.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi</b> : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan			
<b>Misi 1</b> : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat	Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban</li> <li>b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat</li> <li>c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat</li> <li>d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program/kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Gondokusuman meliputi :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  - 1) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
  - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - 1) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor
  - 2) Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
  - 1) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah
4. **Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman**
  - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Gondokusuman
  - 2) Penyelenggaraan, Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
  - 3) Pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Gondokusuman.
  - 4) Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Gondokusuman.
  - 5) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Demangan.
  - 6) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Kotabaru.
  - 7) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Klitren.
  - 8) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Baciro.
  - 9) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Terban.
  - 10) Penyelenggaraan pembangunan wilayah Kecamatan Gondokusuman.

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gondokusuman harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman	350	350	352	354	356	358	360

Urusan wajib yang menjadi tanggungjawab kecamatan di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah urusan pemberdayaan masyarakat desa. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan urusan tersebut adalah dengan melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Gondokusuman Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondokusuman serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Kecamatan Gondokusuman Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gondokusuman yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari rencana strategis ini.

Pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi, dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur di Kecamatan Gondokusuman karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian rencana strategis ini tidak hanya menjadi dokumen administratif karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

TABEL 6.1

## Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			URUSAN WAJIB URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																			
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondokusuman				Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman																	Kec. GK	Kec. GK
						350		352		354		356		358		360		360				
	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman Meningkat			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman				352		354		356		358		360		360				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	795.316.180	100%	846.088.360	100%	871.471.011	100%	897.615.141	100%	924.543.595	100%	952.279.903	100%	952.279.903			
			Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk: a. kordinasi b. pegawai Laporan monitoring dan evaluasi			111.441.000		94.494.000		97.328.820		100.248.685		103.256.145		106.353.829		106.353.829			
			Penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan kantor	Jasa pengamanan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat listrik dan elektronik Materai Materai 3000 Materai 6000 Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan Penyediaan alat-alat perlengkapan kantor Penyediaan bahan komputer Pembayaran listrik Pembayaran air	17 orang 70 jenis 17 jenis 17 jenis 600 lbr 300 lbr 11 jenis 12 jenis 11 jenis 12 bulan 12 bulan	17 orang 70 jenis 17 jenis 17 jenis 600 lbr 300 lbr 11 jenis 12 jenis 11 jenis 12 bulan 12 bulan	581.962.500	17 orang 70 jenis 17 jenis 600 lbr 300 lbr 11 jenis 12 jenis 11 jenis 12 bulan 12 bulan	727.555.500	17 orang 70 jenis 17 jenis 600 lbr 300 lbr 11 jenis 12 jenis 11 jenis 12 bulan 12 bulan	749.382.165	17 orang 70 jenis 17 jenis 600 lbr 300 lbr 11 jenis 12 jenis 11 jenis 12 bulan 12 bulan	771.863.630	17 orang 70 jenis 17 jenis 600 lbr 300 lbr 11 jenis 12 jenis 11 jenis 12 bulan 12 bulan	795.019.539	17 orang 70 jenis 17 jenis 600 lbr 300 lbr 11 jenis 12 jenis 11 jenis 12 bulan 12 bulan	818.870.125	17 orang 70 jenis 17 jenis 600 lbr 300 lbr 11 jenis 12 jenis 11 jenis 12 bulan 12 bulan	818.870.125			

	Pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan											
	STNK roda 2 yang terbayar	8 unit	8 unit											
	STNK roda 3 yang terbayar	2 unit	2 unit											
	STNK roda 4 yang terbayar	1 unit	1 unit											
	Jasa percetakan	7 jenis	7 jenis											
	Jasa penggandaan	215.300 lembar	215.300 lembar											
	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit	6 unit											
	Pembayaran retribusi	12 bulan	12 bulan											
	Peralatan rumah tangga	3 unit	3 unit											
	Bahan bacaan/surat kabar	3 jenis	3 jenis											
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPI dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	101.912.680	4 jenis	24.038.860	4 jenis	24.760.026	4 jenis	25.502.827	4 jenis	26.267.911	4 jenis	27.055.949
	Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	46 dokumen	46 dokumen ASN											
	Jasa Pengelola Arsip	1 orang	1 orang											
	Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan	12 bulan											
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>			<b>438.893.000</b>		<b>393.300.000</b>		<b>405.099.000</b>		<b>417.251.970</b>		<b>429.769.529</b>		<b>442.662.615</b>
Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor	Jasa pengadaan barang dan jasa	6 bulan	6 bulan	348.050.000	6 bulan	276.990.000	6 bulan	285.299.700	6 bulan	293.858.691	6 bulan	302.674.452	6 bulan	311.754.685
	Penyediaan alat rumah tangga	3 jenis	3 jenis											
	Jasa pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	3 jenis											
	Jasa kelengkapan bangunan kantor	1 unit	1 unit											
Pemeliharaan kendaraan dinas	Perawatan kendaraan bermotor	1 mobil, 18 roda dua, 2 roda tiga	1 mobil, 18 roda dua, 2 roda tiga	90.843.000	1 mobil, 18 roda dua, 2 roda tiga	116.310.000	1 mobil, 18 roda dua, 2 roda tiga	119.799.300	1 mobil, 18 roda dua, 2 roda tiga	123.393.279	1 mobil, 18 roda dua, 2 roda tiga	127.095.077	1 mobil, 18 roda dua, 2 roda tiga	130.907.930
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia													
	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	10 orang	10 orang	12.000.000										

<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>63.605.000</b>		<b>9.156.000</b>		<b>9.430.680</b>		<b>9.713.600</b>		<b>10.005.008</b>		<b>10.305.159</b>		<b>10.305.159</b>
Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja PD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan anggaran (renstra,renja,RKA,DPA,PERKIN)	5 dokumen	5 dokumen	<b>63.605.000</b>	5 dokumen	<b>9.156.000</b>	5 dokumen	<b>9.430.680</b>	5 dokumen	<b>9.713.600</b>	5 dokumen	<b>10.005.008</b>	5 dokumen	<b>10.305.159</b>	5 dokumen	<b>10.305.159</b>
	Laporan kinerja OPD (LKIP,SKM,SPIP,Profil,laporan keuangan)	5 dokumen	5 dokumen													
<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman</b>	<b>Nilai survey kepuasan masyarakat</b>			<b>3.091.074.592</b>		<b>3.442.063.316</b>		<b>3.545.325.215</b>		<b>3.651.684.972</b>		<b>3.761.235.521</b>		<b>3.874.072.587</b>		<b>3.874.072.587</b>
	<b>Tingkat Swadaya Masyarakat</b>	76,5	76,5		77	77,5		78		78,5		79		79		
		10%	10%		11%	12%		13%		14%		15%		15%		
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertarikan masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Frekuensi Sosialisasi RT RW	5 kali	5 kali	<b>197.168.600</b>	5 kali	<b>378.290.600</b>	5 kali	<b>389.639.318</b>	5 kali	<b>401.328.498</b>	5 kali	<b>413.368.352</b>	5 kali	<b>425.769.403</b>	5 kali	<b>425.769.403</b>
	Pelaksanaan Pemilihan RT RW	5 Kelurahan	5 Kelurahan													
	Pelaksanaan Pemilihan LPMK	5 Kelurahan	5 Kelurahan													
	Pelaksanaan Pengukuhan RT RW dan LPMK	2 kali	2 kali													
	Pelaksanaan Peningkatan kapasitas RT RW dan LPMK	350 orang	350 orang													
	Pelaksanaan Pelatihan penanggulangan bencana	50 orang	50 orang													
	Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan													
	Pelaksanaan Forkompinka	12 kali	12 kali													
	Frekuensi Monografi	5 dokumen	5 dokumen													
	Pelaksanaan koordinasi Linmas	4 kali	4 kali													
	Jasa pelaksanaan Hibah	5 Kelurahan	5 Kelurahan													
	Pelaksanaan ketertiban, pengamanan umum, vandalisme dan sambang kampung	4 jenis	4 jenis													
	Jasa pengamanan bencana dan keramaian	4 kali	4 kali													

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Pelaksanaan pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	63.294.832	2 dokumen	55.516.410	2 dokumen	57.181.902	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Pelaksanaan monev bantuan keluarga miskin	5 Kelurahan	5 Kelurahan	252.020.360	5 Kelurahan	373.413.500	5 Kelurahan	384.615.905	5 Kelurahan	396.154.382	5 Kelurahan	408.039.014	5 Kelurahan	420.280.184	5 Kelurahan	420.280.184
	Pelaksanaan Lomba HKG	1 kali	1 kali													
	Pelaksanaan pertemuan rutin PKK	12 kali	12 kali													
	Frekuensi Segoro amarto	11 kali	11 kali													
	frekuensi Pembinaan kader jumatik	1 kali	1 kali													
	Pelaksanaan Pelatihan seni budaya	10 kali	10 kali													
	Frekuensi Pentas seni budaya dan HUT kota	4 kegiatan	4 kegiatan													
	Pelaksanaan Pembinaan mental dan spiritual bagi anak dan remaja	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Pelaksanaan Pembinaan Generasi muda	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Pelaksanaan Pembinaan UKS	4 kali	4 kali													
	Pemberdayaan lansia	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Bina keluarga sejahtera	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Penyegaran kader PSM	1 kegiatan	1 kegiatan													
	frekuensi Sosialisasi Bank sampah	65 orang	65 orang													
Penyelenggaraan organisasi sosial masyarakat	4 kali	4 kali														
Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya kelurahan Demangan	Tim pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dll	4 bulan	4 bulan	201.850.000	4 bulan	222.343.800	4 bulan	229.014.114	4 bulan	235.884.537	4 bulan	242.961.074	4 bulan	250.249.906	4 bulan	250.249.906
	Pawai dan pentas budaya	2 kegiatan	2 kegiatan													
	Opeasional JBM	5 bulan	5 bulan													
	Pelatihan MC Jawa	30 orang	30 orang													
	Operasional Kelurahan siaga	12 bulan	12 bulan													
	Penyusunan RPJM Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Penguatan kelembagaan komisi lansia	2 kegiatan	2 kegiatan													
	Pertemuan rutin lansia	12 bulan	12 bulan													
	Bantuan operasional kegiatan kelompok lansia RW	12 RW	12 RW													
	Pelatihan karawitan	6 kali	6 kali													
Kegiatan pertemuan insitusi masyarakat perkotaan	12 kali	12 kali														

	Pelatihan pengelolaan sampah organik dan daur ulang non organik	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Bimtek PAUD	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Pertemuan rutin PAUD	12 bulan	12 bulan													
	Pelatihan kesenian hadroh	10 kali	10 kali													
	Kegiatan PKK	3 kegiatan	3 kegiatan													
	Pelatihan komputer kader P	24 orang	24 orang													
	Sosialisasi kesehatan PKK	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Peningkatan kapasitas linmas	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Kegiatan Linmas	2 Kegiatan	2 Kegiatan													
	Intervensi penduduk miskin	1 kegiatan	1 kegiatan													
	money bantuan keluarga miskin	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Piket hari besar keagamaan	3 kegiatan	3 kegiatan													
Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya kelurahan Kotabaru	Peningkatan kapasitas remaja	50 orang	50 orang	187.230.000	50 orang	202.515.000	50 orang	208.590.450	50 orang	214.848.164	50 orang	221.293.608	50 orang	227.932.417	50 orang	227.932.417
	Sosialisasi kesehatan lansia	75 orang	75 orang													
	Festival kampung lampion	1 kegiatan	1 kegiatan													
	peningkatan kapasitas pendidik PAUD	50 orang	50 orang													
	Sosialisasi PHBS,BUMILKIA dan	75 orang	75 orang													
	FGD penurunan Unmeetneed	50 orang	50 orang													
	Kelurahan siaga	2 kegiatan	2 kegiatan													
	Peningkatan kapasitas jagawarga	50 orang	50 orang													
	Peningkatan kapasitas linmas	50 orang	50 orang													
	Pelatihan jatilan anak	2 kali	2 kali													
	sarasehan sadranan dan sur	100 orang	100 orang													
	pawai dan pentas budaya	2 kegiatan	2 kegiatan													
	Peningkatan JBM	140 orang	140 orang													
	PKK RT RW Kelurahan	4 kali	4 kali													
	Pembinaan yandu plus	4 RW	4 RW													
RPJM kelurahan	25 orang	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		
intervensi keluarga miskin	90 orang	90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		

	Bimtek pengelolaan simpan pinjam	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Bimtek UMKM	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Pelatihan membuat batik	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Kursus membuat kue	1 kegiatan	1 kegiatan													
Pembinaan ekonomi sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	Pelatihan pembuatan ayam panggang	32 orang	32 orang	326.675.800	32 orang	285.362.000	32 orang	293.922.860	32 orang	302.740.546	32 orang	311.822.762	32 orang	321.177.445	32 orang	321.177.445
	Pelatihan membuat sabun dan softener	40 orang	40 orang													
	Pelatihan tas tali koor	40 orang	40 orang													
	Pelatihan hidroponik	48 orang	48 orang													
	Pelatihan kewirausahaan	20 orang	20 orang													
	Pembinaan linmas	60 orang	60 orang													
	Penyuluhan kesehatan reproduksi	40 orang	40 orang													
	Sosialisasi posbindu	40 orang	40 orang													
	Sapaan anak kost	490 orang	490 orang													
	Forum Kebinekaan (FBUB)	160 orang	160 orang													
	Gebyar Lansia	160 orang	160 orang													
	Fasilitasi Seni Budaya	2 kelompok	2 kelompok													
	JBM	16 RW	16 RW													
	Pawai budaya	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Stimulan PKK RT/RW	12 bulan	12 bulan													
	RPJMD	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Pelatihan kerajinan bagi KMS	1 kegiatan	1 kegiatan													
	Uang pikket keagamaan	40 orang	40 orang													
	Sarasehan kesehatan sendi dan tulang	50 orang	50 orang													
Sosialisasi Kelompok Pendukung ibu	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		
Sosialisasi kegawatdaruratan	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		
Pembinaan ekonomi sosial dan budaya	Pelatihan MC bahasa Jawa	1 kegiatan	1 kegiatan	315.577.200	1 kegiatan	252.360.000	1 kegiatan	259.930.800	1 kegiatan	267.728.724	1 kegiatan	275.760.586	1 kegiatan	284.033.403	1 kegiatan	284.033.403

uan buaya  
Masyarakat  
Kelurahan  
Baciro

Pelatihan jahit	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
Pelatihan masak Gudeg	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
pelatihan bagi difabilitas	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
Pelatihan peningkatan kapasitas karang taruna	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
Kegiatan posyandu	21 RW	21 RW		21 RW		21 RW		21 RW		21 RW		21 RW		21 RW		
Pelatihan daur ulang sampah dan limbah rumah	2 kegiatan	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		
Kegiatan PKK	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		
Peningkatan kapasitas DBKS	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
kapasitas FKPM	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
Peningkatan kapasitas kesi	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
Penyuluhan PKADD	85 orang	85 orang		85 orang		85 orang		85 orang		85 orang		85 orang		85 orang		
Peningkatan kapasitas linmas	12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		
Pembinaan pekerti	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
Pelaksanaan monev bantuan keluarga miskin	10 bulan	10 bulan		10 bulan		10 bulan		10 bulan		10 bulan		10 bulan		10 bulan		
Pawai budaya	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
Penyusunan RPJMD	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
Sosialisasi/bintek pengelola UED-SP	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		
Pembinaan ekonomi sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Terban	Administrasi PKK Kelurahan, RT, RW	12 bulan	12 bulan	225.142.000	12 bulan	<b>273.057.000</b>	12 bulan	<b>281.248.710</b>	12 bulan	<b>289.686.171</b>	12 bulan	<b>298.376.756</b>	12 bulan	<b>307.328.059</b>	12 bulan	<b>307.328.059</b>
Operasional JBM Terban	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		
Operasional Kelurahan Siaga	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
Pembinaan poknair	100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		
Pentas dan pawai budaya	2 kegiaiatan	2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		
Gebyar PAUD	1 kegiaiatan	1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		
Pembinaan dan gebyar Lansia	2 kegiaiatan	2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		2 kegiaiatan		
Pembinaan P2WKSS	100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		
Pembinaan Lembaga Kebudayaan Terban	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		
Penyuluhan PKK	1 kegiaiatan	1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		1 kegiaiatan		

	Latihan kesenian dan festival kali belik	2 kegiatan	2 kegiatan													
	TKPK	12 bulan	12 bulan													
	Piket keagamaan	2 kegiatan	2 kegiatan													
Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Gondokusuman	pelaksanaan Pelatihan kewirausahaan UMKM	50 UMKM	50 UMKM	1.322.115.800	50 UMKM	1.399.205.006	50 UMKM	1.441.181.156	50 UMKM	1.484.416.591	50 UMKM	1.528.949.089	50 UMKM	1.574.817.561	50 UMKM	1.574.817.561
	pelaksanaan Gelar potensi UMKM	3 kali	3 kali													
	frekuensi Sosialisasi bagi pemilik pondokan	50 pemilik pondokan	50 pemilik pondokan													
	Pelaksanaan Pembinaan PKL	50 PKL	50 PKL													
	Pebaikan jalan	4 Kelurahan	4 Kelurahan													
	Pemeliharaan fasum	5 kelurahan	5 kelurahan													
	PIU lingkungan	5 kelurahan	5 kelurahan													
	Konsultan perencana dan pelaksanaan	2 pekerjaan	2 pekerjaan													
	Musrenbang	1 Kecamatan 5 Kelurahan	1 Kecamatan 5 Kelurahan													
	Penyusuna profil	1 kali	1 kali													
	Pembuatan inmen	2 semester	2 semester													
	Pelaksanaan Lomba kampung bersih dan sehat	1 kegiatan	1 kegiatan													
				4.400.888.772		4.690.607.676		4.831.325.906		4.976.265.683		5.125.553.654		5.279.320.264		5.279.320.264